

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Kota Surabaya merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Ibukota Provinsi Jawa Timur ini menjadi salah satu pusat perekonomian dan perdagangan di Indonesia, tidak hanya itu, kini Kota Surabaya juga menjadi salah satu kota yang memiliki banyak sekali prestasi terutama dalam bidang lingkungan hidup. Terobosan penataan kota Surabaya yang lebih baik dan jauh lebih “hijau” yang dilakukan oleh Walikota Surabaya ini pun turut mengundang perhatian dari berbagai penduduk di kota lain, maka tidak heran apabila banyak sekali masyarakat dari luar kota yang berbondong-bondong untuk datang ke Kota Surabaya dengan berbagai tujuan. Maka dengan sejumlah alasan tersebut, tidak dapat dihindari bahwa jumlah kepadatan penduduk di Surabaya terus meningkat dari hari ke hari. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, per tanggal 6 Maret 2015 ini, jumlah penduduk kota Surabaya adalah sebesar 2.871.611 Jiwa.¹ Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur menempati tingkat kota terpadat se-Provinsi sebagaimana telah tercantum dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

¹ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Jumlah Penduduk Kota Surabaya*. Diakses dalam <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/beranda> pada tanggal 6 Maret 2015.

Tabel I.1
Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Pertengahan Tahun
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2013

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk				
	1999	2010	2011	2012	2013
Kabupaten					
01. Pacitan	392.48	382.00	383.57	380.69	382.09
02. Ponorogo	626.42	576.00	577.88	604.78	606.24
03. Trenggalek	544.52	543.00	545.21	542.33	543.99
04. Tulungagung	896.55	862.00	867.69	866.88	870.93
05. Blitar	686.22	638.00	637.99	640.47	644.02
06. Kediri	1 033.92	988.00	993.83	992.11	997.72
07. Malang	803.58	709.00	715.07	716.18	721.30
08. Lumajang	544.97	558.00	561.13	561.14	564.40
09. Jember	879.20	698.00	702.61	713.96	718.15
10. Banyuwangi	261.70	433.00	435.42	436.64	438.88
11. Bondowoso	443.87	470.00	472.88	480.80	483.80
12. Situbondo	369.94	392.00	395.17	394.88	396.58
13. Probolinggo	624.14	662.00	667.83	646.06	650.00
14. Pasuruan	1 166.00	1 020.00	1 029.11	1 034.67	1 043.37
15. Sidoarjo	2 370.31	2 712.00	2 758.37	2 793.59	2 837.93
16. Mojokerto	1 312.86	1 056.00	1 067.04	1 071.31	1 079.40
17. Jombang	1 253.44	1 082.00	1 088.76	1 081.92	1 091.21
18. Nganjuk	818.40	794.00	797.59	791.47	795.07
19. Madiun	642.81	656.00	659.06	593.16	595.64
20. Magetan	904.11	881.00	883.55	876.93	878.80
21. Ngawi	638.69	588.00	589.71	585.48	586.89
22. Bojonegoro	510.70	524.00	526.26	524.93	526.91
23. Tuban	568.24	567.00	570.50	569.28	572.75
24. Lamongan	722.78	671.00	672.43	673.44	674.46
25. Gresik	833.47	954.00	966.49	968.57	980.90
26. Bangkalan	668.58	698.00	705.15	708.42	715.65
27. Sampang	641.47	716.00	725.45	734.64	742.68
28. Pamekasan	888.33	1 002.00	1 013.94	1 019.56	1 031.68
29. Sumenep	500.84	499.00	499.33	505.46	507.76
Kota					

71. Kediri	3 964.46	3 901.00	3 934.94	4 085.00	4 128.64
72. Blitar	3 745.66	4 012.00	4 045.21	4 082.52	4 112.18
73. Malang	6 766.37	7 475.00	7 531.74	7 586.61	7 643.66
74. Probolinggo	3 403.49	4 031.00	4 075.96	3 969.50	3 997.88
75. Pasuruan	4 785.26	4 916.00	4 958.26	5 005.03	5 060.13
76. Mojokerto	6 570.60	6 031.00	6 075.85	6 129.70	6 190.30
77. Madiun	5 107.25	5 038.00	5 060.97	5 084.88	5 121.00
78. Surabaya	7 981.57	8 373.00	8 425.78	8 502.18	8 551.30
79. Batu		945.00	954.52	973.50	980.95
Jawa Timur	754.93	783.00	788.96	790.76	794.96

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur²

Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan penduduk dari tahun 1999 hingga tahun 2013 terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Timur. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat kota Surabaya, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya yang pesat tersebut, maka secara tidak langsung menimbulkan berbagai dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Surabaya tersebut. Seperti misalnya, kemacetan, seiring dengan bertambahnya penduduk maka pengguna jalan raya juga semakin meningkat dan pada akhirnya berujung pada kemacetan yang luar biasa di Kota Surabaya. Selain kemacetan, dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Surabaya yakni sampah, dengan jumlah penduduk yang bertambah besar tidak dapat dipungkiri pula bahwa hal tersebut juga meningkatkan volume sampah di Kota Surabaya. Sampah menjadi permasalahan yang penting bagi kota-kota dengan penduduk yang padat seperti

²Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2013*. Diakses dalam http://jatim.bps.go.id/website_baru/linkTabelStatis/view/id/19 pada tanggal 6 Maret 2015.

Kota Surabaya. Sampah akan terus ada dan diproduksi oleh kehidupan manusia. Oleh karena itu, semakin meningkatnya jumlah penduduk maka semakin meningkat juga volume sampah yang dihasilkan. Menurut Sudrajat, sampah merupakan:

“Bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor.”³

Sampah merupakan salah satu hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai. Sampah menjadi masalah penting untuk kota yang padat penduduknya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Volume sampah sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
- Lahan TPA semakin sempit karena tergeser tujuan penggunaan lain.
- Teknologi pengelolaan sampah tidak optimal sehingga sampah lambat membusuknya. Hal ini menyebabkan percepatan peningkatan volume sampah lebih lebih besar dari pembusukannya. Oleh karena itu, selalu diperlukan perluasan areal TPA baru.
- Sampah yang sudah matang dan telah berubah menjadi kompos tidak dikeluarkan dari TPA karena berbagai pertimbangan.
- Manajemen pengelolaan sampah tidak efektif sehingga seringkali menjadi penyebab distorsi dengan kasyarakat setempat.
- Pengelolaan sampah dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan.

³ H. R. Sudrajat, 2009, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penebar Swadaya.

- Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk sampingan dari sampah sehingga menyebabkan tertumpuknya produk tersebut di TPA.⁴

Seperti yang dilansir dalam media berita *online* Suara Surabaya pada tanggal 7 Maret 2014 lalu, jumlah sampah rumah tangga dapat mencapai 10 Ton per harinya.⁵ Hal ini diungkapkan langsung oleh Chalid Buchari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Surabaya melalui media Suara Surabaya tersebut. Namun, beberapa tahun terakhir ini, Ibu Walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini membawa perubahan yang sangat besar bagi kota ini. Dengan *background* pendidikan arsitek yang dimilikinya, beliau mampu menata kota Surabaya menjadi kota yang sangat indah, bersih dan hijau. Dengan berbagai terobosannya ini, beliau juga tak luput memperhatikan tentang permasalahan sampah yang ada di kota Surabaya. Berbagai inovasi pun dilakukan untuk terus dapat memperbaiki dan mengatasi permasalahan tersebut. Seperti halnya, dengan menerapkan metode 3R: *Reduce* (Pengurangan Sampah), *Reuse* (Menggunakan Kembali), dan *Recycle* (Daur Ulang). Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menurut majalah potensi dalam website kominfo Jatim, mengungkapkan bahwa konsep dari metode 3R adalah sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*

⁵ Teguh Ardi Srianto, 2014, *Sampah Rumah Tangga Surabaya 10 Ton Perhari*, Suara Surabaya Online, diakses dalam <http://www.suarasurabaya.net/fokus/145/2014/131293-Sampah-Rumah-Tangga-Surabaya-10-Ton-Perhari> pada tanggal 6 Maret 2015.

“Metode 3R merupakan konsep pengolahan sampah 3R berbasis masyarakat, yang merupakan paradigma baru yang lebih menekankan pada pengurangan sampah yang lebih ramah lingkungan.”⁶

Metode ini terbukti mampu membawa Kota Surabaya menjadi kota percontohan pengolahan sampah secara nasional bahkan internasional. Seperti yang dikutip dari media *online* resmi Kominfo Jatim pada tanggal 15 April 2014 lalu, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kota Surabaya dinilai telah berhasil menjalankan dua syarat sehingga menjadi kota percontohan pengolahan sampah secara nasional bahkan internasional. Itu salah satu alasan Surabaya didaulat menjadi tuan rumah *event* nasional dan internasional: Hari Peduli Sampah (HPS) 2014 bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Deklarasi Gerakan Indonesia Peduli Sampah yang dihadiri 30 Walikota/ Bupati se Indonesia dan forum The 5th Regional 3R Forum in Asia & The Pacific yang dihadiri 300 peserta dari 38 negara di Asia Pasifik.”⁷

Pencapaian yang telah dilakukan oleh Ibu Risma dan segenap masyarakat Surabaya tersebut sangat luar biasa, apabila melihat lagi ke belakang betapa tingginya timbunan sampah di Surabaya. Namun, yang sangat disayangkan masih terdapat beberapa daerah di kota Surabaya, di Banyu Urip misalnya yang masih terlihat tumpukan sampah yang padat dan memiliki ketinggian hingga mencapai satu meter, sampah-sampah tersebut sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga.⁸ Penyebab utama dari tumpukan sampah di daerah Banyu Urip tersebut ternyata sebagian besar disebabkan oleh sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan oleh masyarakat setempat sehingga menimbulkan berbagai dampak seperti misalnya tersumbatnya saluran air di daerah tersebut. Dengan melihat

⁶ PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2014. *SURABAYA KOTA PERCONTOHAN PENGOLAHAN SAMPAH*. Diakses di <http://kominfo.jatimprov.go.id/watchp/1115> pada tanggal 7 Maret 2015.

⁷ *Ibid.*

⁸ Gita Gowinda, 2014, *Duh, Gorong-gorong Banyu Urip Surabaya Penuh Sampah*, Detik Online, diakses dalam <http://news.detik.com/read/2014/09/12/132855/2688655/475/2/duh-gorong-gorong-banyu-urip-surabaya-penuh-sampah?nd772204topcom> pada tanggal 7 Maret 2015.

masih belum terselesaikannya masalah sampah di Indonesia, kemudian PT PLN (Persero) menjadikan ini sebagai peluang untuk melibatkan diri dalam mengatasi permasalahan sampah.

Potensi ini, kemudian dilihat oleh Tim CSR – Bina Lingkungan PLN sebagai sebuah peluang yang layak dikemas dalam sebuah desain program aksi CSR – Bina Lingkungan 2012. Definisi CSR menurut Hendrik Budi Untung, adalah:

“CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.”⁹

Perkembangan konsep dan praktik CSR di Indonesia tentu tidak lepas dari perkembangan perekonomian di dunia internasional. Pengaruh globalisasi yang cenderung mengangkat isu demokratisasi membawa implikasi dimasukkannya agenda HAM serta penguatan aparat sipil Negara sekaligus member peluang bagi perluasan sayap bisnis. Tetapi, kesempatan ini tidak boleh dilihat sebagai peluang untuk memperluas eksploitasi terhadap SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia) semata. Dengan kata lain, proses perluasan bisnis harus diiringi dengan kesadaran akan adanya kesempatan pemerataan kesejahteraan. Komitmen ini seharusnya dapat diartikan dengan menempatkan suatu perusahaan sebagai *partner* yang baik dengan komitmen penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan komunitas lokal dan pelestarian lingkungan.¹⁰ Pada dasarnya yang diharapkan oleh perusahaan dari pelaksanaan CSR selain untuk memberdayakan

⁹ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹⁰ Leimona, Beria dan Aunul Fauzi. 2008. *CSR dan Pelestarian Lingkungan: Mengelola Dampak Positif dan Negatif*. Jakarta: Indonesia Business Links. Hlm. xxiii.

masyarakat adalah agar operasional perusahaan tersebut dapat berjalan lancar tanpa hambatan.¹¹

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang menyediakan listrik bagi kepentingan umum dimana perusahaan tersebut juga memiliki berbagai program CSR diantaranya program bina lingkungan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN.¹² Salah satu program binaan lingkungannya yakni dengan mendirikan bank sampah yang bertujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan warga dan organisasi atau komunitas diperkampungan, meningkatkan kebersihan lingkungan serta menjaga kelestarian alam.

Edi Suharto mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah:

“Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (*a*) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (*b*) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

¹¹Hendrik Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 6.

¹² PT PLN (Persero), *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, diakses dalam <http://www.pln.co.id/blog/csr/> pada tanggal 7 Maret 2015.

perluan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”¹³

Awal mula didirikannya bank sampah adalah dimulai pada tahun 2011 yakni melalui program kampung binaan CSR – Bina Lingkungan PLN yang telah berhasil melakukan pelatihan dan mendorong berdirinya 125 titik bank sampah binaan di Surabaya dan 280 titik bank sampah di Malang. Dan untuk menjaga keberlanjutan program dan mendukung perkembangan bank sampah tersebut maka pada tahun 2012, CSR – Bina Lingkungan PLN kembali membuat Program Wirausaha Bersinar “PPOB – Bayar listrik dengan sampah” dan “Bank Sampah Induk“. Selain sebagai bentuk keberlanjutan program dari tahun sebelumnya, program ini juga sebagai bentuk komitmen PLN untuk terus mengembangkan bank sampah dan mencari terobosan agar dapat memberi manfaat bersama antara masyarakat dan perusahaan.”¹⁴

Seiring berjalannya waktu, bank sampah yang didirikan oleh Tim CSR – Bina Lingkungan PLN ini mendapat perhatian dari berbagai pihak atas keberhasilannya di beberapa daerah. Tidak hanya mampu mengatasi permasalahan sampah saja, bank sampah ini terbukti mampu mencuri perhatian kancha dunia untuk dijadikan sebagai percontohan. Berikut kutipan dari media berita Neraca mengenai hal tersebut:

“Belum lama ini, tepat pada Pameran 4th Climate Exchange Education and Expo yang berlangsung pada 1-4 Mei 2014 lalu di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Stand PLN menampilkan Binaan Bank Sampah. Bank Sampah PLN yang merupakan percontohan untuk negara ASEAN & Asia Fasifik saat ini sudah memiliki lebih dari 29.000 nasabah yang tersebar di 500 titik di beberapa provinsi di Indonesia, Salah satunya

¹³ Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 58.

¹⁴PT PLN (Persero), *loc. cit.*

kota malang. Sebagai Induk Bank sampah terbesar, Bank Sampah PLN di Malang mampu mengumpulkan 4500 kg sampah perhari.”¹⁵

Dengan banyaknya sampah yang terkumpul setiap harinya di bank sampah, menjadikan beberapa daerah menjadi lebih bersih dan tidak tergenang sampah. Dampak yang dapat dirasakan tentu saja tidak hanya berupa kebersihan dan kenyamanan saja, namun dengan hadirnya bank sampah, sampah-sampah tersebut disulap menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan nilai materiil yang dapat dikatakan cukup. Melalui program binaan PLN yaitu bank sampah yang telah beroperasi sejak tahun 2011, bank sampah tersebut mampu memperoleh pendapatan hingga mencapai angka 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) rupiah per bulannya dengan didukung sumberdaya yang baik dan memiliki jiwa social yang tinggi.¹⁶ Pendapatan yang lumayan tersebut dijadikan masyarakat sekitar sebagai motivasi atau acuan untuk terus mengumpulkan sampah-sampah baik di sekitar lingkungan rumah maupun sampah rumah tangga. Hal ini tentu saja menjadi kebiasaan yang baik dan patut dicontoh. Tidak hanya dapat menciptakan sebuah lingkungan yang bersih dan nyaman, namun masyarakat juga memiliki penghasilan tambahan dari sampah-sampah tersebut.

Beberapa program bank sampah yang tersebar di beberapa titik di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, Bank Sampah Bintang Mangrove merupakan bank sampah yang dapat dikatakan terbaik di kalangannya. Terbukti hal tersebut telah dinyatakan oleh program TV Show Kick Andy sebagai bank sampah terbaik dari semua lembaga binaan PLN dan berhasil meraih hadiah sebesar 100 (seratus) juta

¹⁵ Neraca, 2014, *Bank Sampah CSR PLN Jadi Percontohan Negara ASEAN*, diakses dalam <http://www.neraca.co.id/csr/41243/Bank-Sampah-CSR-PLN-Jadi-Percontohan-Negara-ASEAN> pada tanggal 8 Maret 2015.

¹⁶ *Ibid.*

rupiah. Penilaian tersebut bukan ditentukan oleh pihak PLN melainkan dari tim Kick Andy itu sendiri. Bahkan Ibu Chusniyati sebagai pengurus dari bank sampah tersebut pernah diundang secara langsung oleh Tim dari Kick Andy sebagai tamu inspiratif pada episode Kick Andy edisi Jum'at 18 Oktober 2013 dengan tema "Dari Kami Untuk Negeri"¹⁷. Pemaparan inspiratif mengenai keberhasilan bank sampah bintang mangrove oleh Ibu Chusniyati itu pun berhasil menarik perhatian dan tepuk tangan dari sejumlah penonton dalam acara tersebut. Tidak hanya itu, prestasi yang pernah dicapai oleh bank sampah tersebut bahkan pernah mendatangkan orang-orang dari ASEAN untuk melihat dan mencontoh kesuksesan bank sampah tersebut. Sungguh prestasi yang cukup membanggakan apabila melihat tempat berdirinya bank sampah tersebut yang hanya terpencil di dekat pesisir laut.

Bank Sampah Bintang Mangrove yang beroperasi di Kampung Gununganyar Tambak, Surabaya tersebut berdiri dengan berlatar belakang kondisi tanaman mangrove yang setiap tahun ditanam oleh PLN sering mati, akibat banyaknya lilitan sampah sehingga tanaman mudah terbawa arus. Selama ini proses pembersihan sungai dilakukan melalui kerja bakti, dengan membayar warga setempat, atau pembersihan oleh dinas terkait. Namun proses kegiatan ini tidak mungkin dilakukan melalui pengerahan warga dengan membayar *fee* tertentu secara terus menerus. Bank Sampah Bintang Mangrove mulai beroperasi pada bulan April 2012, saat ini memiliki kurang lebih 180 nasabah.

¹⁷ Metrotvnews, 2013, *Kick Andy!: Dari Kami untuk Negeri* diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=eJGH7NeTAJ4> pada tanggal 8 Maret 2015.

Volume sampah yang dihasilkan Bank Sampah Bintang Mangrove dari laut mencapai 700 hingga 900 kg sampah seperti plastik dan kardus yang diambil nelayan dari sungai. Sampah-sampah tersebut kemudian ditabung dalam bank sampah bintang mangrove, sehingga kondisi sungai menjadi lebih bersih.¹⁸ Tidak dapat dipungkiri sampah-sampah yang dibuang ke sungai dapat berdampak sangat fatal. Banyaknya sampah berbahan plastik yang beredar di sungai tentu berdampak pada lingkungan sungai yang tercemar, khususnya di sekitar mangrove Gununganyar yang juga merupakan ancaman terhadap kerusakan keberlangsungan ekosistem mangrove maupun ekosistem lain apabila tidak segera ditangani. Sampah-sampah tersebut tersangkut pada akar-akar tanaman mangrove sehingga berdampak pada tanaman mangrove yang masih muda tidak dapat berkembang dengan baik.¹⁹ Dengan adanya program Bank Sampah Bintang Mangrove ini, kini sampah yang dulunya dibuang di sungai oleh warga setempat itu, tidak lagi dibuang di sungai.

Sebagian besar warga Kampung Gununganyar Tambak memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan di laut. Namun seiring dengan perubahan iklim maupun cuaca yang kurang bersahabat membuat nelayan beserta keluarganya tidak selalu mendapatkan hasil ekonomi dari kegiatan melaut. Kesadaran masyarakat termasuk nelayan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menjadikan nelayan juga ikut terlibat mengumpulkan sampah-sampah

¹⁸ PT PLN (Persero). *loc. cit.*

¹⁹ Petrus Riski, 2013, *Memanfaatkan Sampah Sambil Menyelamatkan Mangrove*, diakses dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/07/23/memanfaatkan-sampah-sambil-menyelamatkan-mangrove/> pada tanggal 8 Maret 2015.

yang menggenang di laut disela-sela pekerjaannya mencari ikan. Peran warga setempat dalam membersihkan mangrove sangat dibutuhkan. Sebagian besar nelayan yang juga turut serta memunguti sampah di sekitar laut yang kemudian hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi lingkungan mangrove tersebut. Kondisi laut yang sedikit demi sedikit mulai jauh dari genangan sampah, kini dapat terlihat di sepanjang aliran sungai tersebut. Tidak hanya itu, beberapa nelayan yang semula hanya menggantungkan pendapatannya dari hasil tangkapan ikan saja, kini mereka dapat meraup tambahan penghasilan dari hasil penjualan sampah-sampah dari laut tersebut.

Menurut pemaparan Ibu Chusniyati dalam acara Kick Andy lalu, program yang ada dalam Bank Sampah Bintang Mangrove tersebut tidak hanya mengenai jual-beli sampah saja, namun beliau membuat berbagai program dalam bank sampah tersebut. Beliau dan pengurus bank sampah yang lain membuat beberapa program dari sampah tersebut, yakni yang pertama adalah membayar listrik dengan sampah, dimana nasabah bank sampah tersebut dapat menyerahkan sampah ke bank sampah untuk kemudian ditimbang dan diberikan nilai jualnya sesuai dengan standarnya dan setelah itu nilai tersebut dicatat dalam buku tabungan sebagai tabungan untuk membayar listrik kelak di awal bulan. Program lainnya yaitu simpan pinjam dengan sampah, berobat dengan sampah, dan membuat buku peduli lingkungan dengan sampah. Program-program tersebut tidak lepas dengan sampah sebagai subyek utamanya. Dengan adanya program-program tersebut, masyarakat setempat menjadi lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi sebagai nasabah bank sampah tersebut, bahkan bank sampah

bintang mangrove yang awalnya hanya memiliki nasabah sekitar 59 saja, kini menjadi kurang lebih 180 nasabah. Dengan jumlah nasabah yang kian hari kian meningkat itu, maka proses perputaran dana (*revolving fund*) yang terjadi dalam bank sampah tersebut juga mengalami grafik yang signifikan. Bahkan diceritakan langsung oleh Ibu Chusniyati selaku pengurus dari bank sampah tersebut, dalam jangka waktu 2 tahun, Bank Sampah Bintang Mangrove mampu meningkatkan modal sebesar 61,29%, dari modal awal sebesar Rp 12.400.000,- menjadi Rp 20.000.000,-.

Dalam studi terdahulu, Adi Chandra Berampu meneliti dan menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Program CSR PT PLN (Persero). Fokus dari penelitian ini ada dua yaitu yang pertama, menganalisis hubungan karakteristik individu dengan tingkat partisipasi peserta dalam program bank sampah dan yang kedua adalah menganalisis hubungan tingkat partisipasi peserta program bank sampah dengan tingkat manfaat program. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu (tingkat umur, tingkat pendidikan, lama tinggal, dan tingkat pendapatan) dengan tingkat partisipasi nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove binaan CSR PT PLN (Persero). Dan yang kedua, adalah terdapat hubungan antara tingkat partisipasi nasabah Bank Sampah Bintang Mangrove binaan CSR PT PLN (Persero) dengan tingkat manfaat program (tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, tingkat kebersihan lingkungan, dan tingkat peluang ekonomi).²⁰

²⁰ Adi Chandra Berampu, 2013, *Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Program CSR PT PLN (PERSERO)*, Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Fildzah Aprilianti Diana yang meneliti tentang “Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah” (Studi di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya). Fokus penelitian ini adalah dampak ekonomi dan fokus yang kedua adalah dampak sosial. Hasil dari penelitian ini adalah adanya Program Bank Sampah Bintang Mangrove memberikan dampak ekonomi yang positif dalam menambah penghasilan tetapi tidak pada jumlah tabungan yang dimiliki nasabah hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran nasabah akan menabung. Dampak sosial berdampak positif bagi masyarakat adanya perubahan pola pikir terhadap pemilahan sampah, kini masyarakat mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya.²¹

Penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian pada tingkat partisipasi masyarakat dan dampak atau akibat dari suatu program CSR tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, lebih memfokuskan pada proses *revolving fund* yang terjadi dalam program CSR tersebut dan dampaknya terhadap para pelaku yang berbasis sumberdaya lokal mangrove. Lebih menyempitkan ruang lingkup penelitiannya yakni pada masyarakat sekitar pesisir yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada konsep pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan kurang mendalam pada satu titik permasalahan. Akan tetapi, penelitian ini berusaha membuat ruang lingkup penelitian menjadi lebih sempit dan lebih berfokus pada satu titik permasalahan yakni dampak pertumbuhan sistem peputaran dana (*revolving fund*) pada tingkat kesejahteraan

²¹ Fildzah Aprilianti Diana, 2014, *Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)*, Skripsi, Surabaya: UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal mangrove. Sasaran dari penelitian ini juga hanya sebatas pada orang-orang yang secara langsung terlibat dalam proses ini.

Menurut UN-HABITAT , *Revolving Fund*/dana bergulir adalah

“Pendanaan yang didirikan dengan tujuan untuk digulirkan/dipinjamkan kepada peminjam yang sama lebih dari satu kali. *Revolve*/bergulir, berarti bahwa dana tersebut beredar diantara pengguna dan pengelola. Dana bergulir didirikan untuk tujuan bahwa dana tersebut sebisa mungkin dapat beroperasi secara mandiri, artinya bahwa dalam operasinya didapatkan biaya/nilai tambah melalui pemberlakuan bunga, jasa, *fee*, dan lain sebagainya.”²²

Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri tentu saja adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan ekonominya. Menurut Friedlander, kesejahteraan sosial adalah:

“Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.”²³

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan *best practices* dari Bank Sampah Bintang Mangrove mengenai proses pertumbuhan sistem perputaran dana (*revolving fund*) dan juga mengenai dampak positif pertumbuhan sistem *revolving fund* tersebut pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya.

²² UN-HABITAT , 2006, *Guidelines On Revolving Funds For Community Managed Water Supply Schemes And Construction Of Ousehold Toilets In Urban Slums In Madhya Pradesh, India*, Government of Madhya Pradesh, hlm. 7.

²³ Adi Fahrudin, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 9.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pertumbuhan sistem perputaran dana (*revolving fund*) pada program bank sampah bintang mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya?
- 2) Bagaimana dampak pertumbuhan sistem perputaran dana (*revolving fund*) program bank sampah bintang mangrove pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk menggambarkan bagaimana pertumbuhan sistem perputaran dana (*revolving fund*) pada program bank sampah bintang mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya.
- 2) Untuk menggambarkan bagaimana dampak pertumbuhan sistem perputaran dana (*revolving fund*) program bank sampah bintang mangrove pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak Kota Surabaya.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil data dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang studi pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak pemberdayaan masyarakat.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi *best practices* mengenai dampak dari pertumbuhan sistem perputaran dana (*revolving fund*) program bank sampah bintang mangrove pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal mangrove di Kelurahan Gununganyar Tambak, Surabaya untuk kemudian disebarkan sebagai informasi maupun inspirasi untuk kawasan-kawasan lain kota Surabaya maupun kota-kota lainnya agar dapat dibuat sebagai percontohan.

I.5. Kerangka Teori

I.5.1. Pengembangan Sumberdaya Lokal

Pembangunan suatu daerah selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumberdaya alam. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumberdaya alam dan makin efisien pemanfaatan sumberdaya alam tersebut, makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan ekonomi yang baik dalam jangka panjang.²⁴ Pengembangan (*development*) dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Pengembangan menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di waktu mendatang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumberdaya adalah:

“Faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, dan modal yg dipakai dl kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, serta mendistribusikannya; (2) bahan atau keadaan yg dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya; (3) segala sesuatu, baik yg berwujud maupun yg tidak berwujud, yg digunakan untuk mencapai hasil, msl peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga.”²⁵

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, sumberdaya adalah:

“Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumberdaya buatan.”²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lokal berarti terjadi (berlaku, ada, dsb) di satu tempat, tidak merata; setempat.²⁷

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumberdaya lokal adalah suatu potensi yang dimiliki oleh daerah setempat

²⁴ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir, 1987, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press, Hlm. 29.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 973.

²⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup www.komisiyudisial.go.id diakses pada tanggal 11 Maret 2015

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. cit*, hlm 600.

yang terdiri atas berbagai unsur lingkungan hidup yakni sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumberdaya buatan.

Pada intinya, pengembangan sumberdaya lokal adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh daerah setempat yang terdiri atas berbagai unsur lingkungan hidup yakni sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumberdaya buatan. Upaya pengembangan sumberdaya lokal tersebut dilakukan melalui: 1) pengidentifikasian dan peningkatan kualitas sumberdaya lokal, dan 2) pengelolaan sumberdaya lokal yang efektif.

1.5.1.1. Pengidentifikasian dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Lokal

Dalam proses pengembangan sumberdaya lokal, tahapan yang paling utama adalah pertama-tama dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kualitas sumberdaya yang dimiliki. Dengan mengidentifikasi, maka diharapkan dapat diketahui seberapa baik kualitas sumberdaya itu. Setelah mengidentifikasi dengan cermat maka kemudian dilanjutkan dengan tahapan meningkatkan kualitas sumberdaya tersebut dengan melalui berbagai proses, seperti eksplorasi, eksploitasi, dan juga konservasi terhadap sumberdaya yang dimiliki tersebut.

1.5.1.1.1. Eksplorasi Sumberdaya Lokal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplorasi adalah:

“Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yg terdapat di tempat itu; penyelidikan; penjajakan.”²⁸

Jadi, eksplorasi sumberdaya lokal adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang di daerah setempat dengan melalui penyelidikan dan penjajakan.

1.5.1.1.1.1. Penjelajahan terhadap Sumberdaya Lokal

Merupakan suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan dengan menjelajahi suatu sumberdaya yang terdapat di daerah setempat.²⁹

1.5.1.1.1.2. Penyelidikan terhadap Sumberdaya Lokal

Merupakan usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data dengan cara menyelidiki, mengurut dan melacak sumberdaya yang ada di daerah setempat.³⁰

1.5.1.1.1.3. Penjajakan terhadap Sumberdaya Lokal

Merupakan proses/cara/perbuatan menjajaki, penelaahan, pendugaan terhadap suatu sumberdaya yang ada di daerah setempat.

1.5.1.1.2. Eksploitasi Sumberdaya Lokal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi berarti pengusahaan; pendayagunaan.³¹ Jadi eksploitasi sumberdaya lokal

²⁸ *Ibid*, hlm. 254.

²⁹ *Ibid*, hlm. 407.

³⁰ *Ibid*, hlm. 899.

³¹ *Ibid*, hlm. 395.

dapat diartikan sebagai suatu proses pengusahaan atau pendayagunaan terhadap suatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah setempat.

I.5.1.1.2.1. Pendayagunaan Sumberdaya Lokal

Merupakan suatu proses pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dari sumberdaya yang dimiliki oleh daerah setempat.



1.5.1.1.2.2. Pemanfaatan Secara Lestari Sumberdaya Lokal Dan Ekosistemnya

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah setempat semaksimal mungkin dengan cara yang benar tanpa merusak kehidupan ekosistem didalamnya.

1.5.1.1.3. Konservasi Sumberdaya Lokal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi adalah

“Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan melestarikan.”³²

Jadi, konservasi sumberdaya lokal adalah suatu tindakan pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh daerah setempat dengan cara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan melestarikannya.

1.5.1.1.3.1. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap suatu sistem yang berperan penting dalam menunjang kelangsungan hidup makhluk di sekitarnya, seperti misalnya peraturan yang melindungi, partisipasi masyarakat dan sebagainya.

³² *Ibid*, hlm. 520.

1.5.1.1.3.2. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Beserta Ekosistemnya

Merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan tujuan merawat sesuatu yakni berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup di dalam sumberdaya lokal agar dapat bertahan lama.

1.5.1.2. Pengelolaan Sumberdaya Lokal yang Efektif

Pengelolaan sumberdaya lokal yang efektif diperlukan untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam sumberdaya tersebut. Dengan pengelolaan yang efektif maka diharapkan dapat berperan penting dalam upaya pengembangan sumberdaya lokal tersebut.

Menurut Dr. Ir. Sutardi, M.Eng, selaku Kasubdit. Konservasi Sumberdaya air, pengelolaan sumberdaya air yang efektif mencakup 4 bidang yakni, bidang perlindungan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan. Selanjutnya, agar pengelolaan SDA (Sumberdaya Alam) dapat berjalan efektif maka diperlukan paling tidak 3 elemen dasar dari pengelolaan terpadu SDA, ketiga elemen tersebut mencakup lingkungan yang menunjang (*the enabling environment*), peran institusi dan fungsi institusi (*the institutional roles*), instrumen-instrumen manajemen (*the management instruments*).³³

³³ Sutardi, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Efektif*, Bandung: Badan Perencanaan Daerah, Propinsi Jawa Barat.

1.5.1.2.1. Lingkungan yang menunjang (*the enabling environment*)

Dalam bentuk kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan dan informasi pengelolaan SDA oleh *stakeholders*.

1.5.1.2.2. Peran institusi dan fungsi institusi (*the institutional roles*)

Diperlukan kerangka dan fungsi institusi yang mampu berperan dengan efektif pada berbagai tingkatan pemerintahan dan stakeholders; dan

1.5.1.2.3. Instrumen-instrumen manajemen (*the management instruments*)

Dalam bentuk diantaranya instrumen operasional agar peraturan dapat diterapkan dengan efektif sistem monitoring dan evaluasi serta upaya penegakkan hukum yang konsisten.

I.5.2. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal

Baik di Negara maju maupun berkembang, segala upaya pembangunan yang dilakukan selalu bertujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak hanya dalam aspek sosial, namun aspek ekonomi juga menjadi faktor yang penting, yang juga turut menjadi tolak ukur suatu keberhasilan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”³⁴

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam Nurul Hidayah, menjelaskan 5 tahapan utama keluarga sejahtera serta ciri-ciri yang membedakan berdasarkan pemenuhan kebutuhannya. 5 tahapan tersebut adalah :

1. Keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan.
2. Keluarga sejahtera tahap 1, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologinya, seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, serta interaksi dalam lingkungan tempat tinggal.
3. Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangan seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera tahap 3, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti memberikan sumbangan dalam bentuk materiil serta bantuan sosial.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 10

5. Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik bersifat dasar, sosial psikologis, pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.³⁵

Dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, Abraham H. Maslow dalam T. Sumarnonugroho mengelompokkannya ke dalam 5 tingkat kebutuhan, yaitu:

1. Kebutuhan-kebutuhan fisik (udara, air, makan dan sebagainya)
2. Kebutuhan rasa aman (jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan)
3. Kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi
4. Kebutuhan untuk penghargaan (dari dirinya dan pihak lain)
5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertumbuh.³⁶

Disamping pemaparan mengenai kebutuhan dasar manusia, dalam meneliti tingkat kesejahteraan masyarakat juga perlu dilengkapi dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat, karena dari indikator-indikator inilah nantinya dapat diketahui beragam tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan diteliti.

³⁵ Nurul Hidayah, 2014, *Dampak Akselerasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. I-56–I-57.

³⁶ T. Sumarnonugroho, 1984, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: PT Hanindita, hlm. 6.

Tjokrowinoto menjelaskan indikator kesejahteraan sosial Indonesia yang kemudian disebut sebagai indikator kesejahteraan rakyat, mencakup 6 komponen utama, yaitu:

1. Penduduk keluarga berencana dan migrasi
2. Pendidikan dan sosial budaya
3. Kesehatan, gizi dan pengeluaran/ konsumsi rumah tangga
4. Angkatan kerja
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Perumahan dan lingkungan hidup³⁷

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik dalam Nurul Hidayah, menyebutkan 8 indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran keluarga
3. Keadaan tempat tinggal
4. Fasilitas tempat tinggal
5. Kesehatan anggota keluarga
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
7. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.³⁸

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai kesejahteraan sosial masyarakat dengan beberapa indikatornya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal adalah

³⁷ Moeljarto Tjokrowinoto, 2001, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 119.

³⁸ Nurul Hidayah, *op. cit.*, hlm. I-59.

suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal agar dapat hidup layak dan berkecukupan. Untuk mengukur hal tersebut, kemudian peneliti memutuskan untuk menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meneliti tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan diteliti. Peneliti berfokus pada penelitian mengenai tingkat kesejahteraan ekonominya, sehingga peneliti memodifikasi beberapa indikator tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian. Indikator yang digunakan yaitu: tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pemilikan dan penguasaan aset, dan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat yang berbasis pada sumberdaya lokal setempat.

I.5.2.1. Tingkat Pendapatan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal

Menurut Hicks dalam Annisa Ganis Damarjati, pendapatan adalah

“Jumlah yang dapat dibelanjakan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, sementara nilai kekayaannya tetap utuh. Dalam melakukan pengukuran, nilai konsumsi ditambah perubahan nilai kekayaan harus sama dengan jumlah penerimaan, keuntungan dari penjualan aktiva, nilai tunjangan tambahan dan produksi untuk konsumsi keluarga dan sewa yang diperoleh.”³⁹ Namun, dalam praktek, hal ini sulit diterapkan, karena dalam pengukuran perubahan kekayaan terdapat penilaian kembali persediaan modal. Salah satu alternatif dalam mengukur pendapatan adalah melalui pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan faktor yang relevan dalam penilaian kesejahteraan.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah semua jumlah uang yang didapatkan atau diterima oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil produktivitas mereka, baik yang

³⁹ Annisa Ganis Damarjati, 2010, *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Propinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. I-20 – I-21.

berasal dari gaji/upah, aset produktif maupun dari pemerintah seperti subsidi dan lain sebagainya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berbasis sumberdaya lokal adalah semua jumlah uang yang didapatkan atau diterima oleh seseorang atau sekelompok orang dengan berbasis atau berasal dari sumberdaya lokal setempat, dapat berupa pemanfaatan maupun penggalan aset setempat dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010 dalam Ensiklopedia Kementerian Keuangan membagi jenis penghasilan ke dalam 2 bentuk, yaitu penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap.

1.5.2.1.1..... P

pendapatan Tetap

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2009 dalam Ensiklopedia Kementerian Keuangan, penghasilan tetap adalah

“Penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.”⁴⁰

Jadi, pendapatan atau penghasilan tetap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan atau penghasilan yang diterima secara teratur setiap bulannya.

1.5.2.1.2..... P

pendapatan Tidak Tetap

⁴⁰ Ensiklopedia Kementerian Keuangan, 2015, *Penghasilan Tetap dan Teratur*, diakses di <http://www.wikiapbn.org/penghasilan-tetap-dan-teratur/#to-penghasilan-tetap-dan-teratur-n-3> pada tanggal 10 Mei 2015.

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010 dalam Ensiklopedia Kementerian Keuangan, penghasilan tidak tetap adalah

“Penghasilan berupa honor dan (ongkos) perjalanan dinas.”⁴¹

Jadi, pendapatan atau penghasilan tidak tetap (insidental) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan yang tidak terduga, yang diterima hanya pada waktu-waktu tertentu dan tidak teratur datangnya.

I.5.2.2. Tingkat Pemilikan dan Penguasaan Aset Berbasis Sumberdaya

Lokal

Menurut Doli D. Siregar, pengertian aset secara umum adalah

“Barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).”⁴²

Selanjutnya, Michael Sherraden mengungkapkan pola distribusi aset saat ini yang juga berhubungan dengan pendapatan masyarakat:

“Pada umumnya, pola distribusi aset ini terkait dengan pola distribusi pendapatan, mereka yang memiliki pendapatan yang kecil cenderung memiliki aset yang sedikit dibanding mereka yang memiliki pendapatan lebih besar. Akan tetapi, distribusi aset lebih tidak merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan.”⁴³

Dari pemaparan mengenai aset di atas, kemudian peneliti mengelompokkan aset berdasarkan 2 jenis yaitu aset produksi dan aset non produksi, yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan nantinya.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Doli. D. Siregar, 2004, *Manajemen Aset*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 178.

⁴³ Michael Sherraden, 2006, *Aset Untuk Orang Miskin*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 145.

1.5.2.2.1..... T

tingkat Pemilikan Aset Produksi

Aset produksi bagi masyarakat berbasis sumberdaya lokal merupakan segala sesuatu properti baik konkret maupun abstrak yang dapat menghasilkan produk/jasa lainnya serta menambah nilai kemanfaatan suatu barang/jasa dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah setempat.⁴⁴ Aset produksi umumnya digunakan untuk menunjang aktivitas pokok pekerjaan masyarakat serta berbagai aktivitas produksi pada umumnya, misalnya perahu, jaring, alat pengambil sampah dan lain sebagainya.

1.5.2.2.2..... T

tingkat Pemilikan Aset Non Produksi

Aset non produksi bagi masyarakat berbasis sumberdaya lokal adalah aset yang digunakan sebagai tambahan untuk menunjang kelancaran aktivitas produksi.⁴⁵ Bagi masyarakat berbasis sumberdaya lokal dalam penelitian ini, aset tersebut sangat berhubungan sekali dengan tingkat pendapatan yang dimiliki. Aset tersebut, misalnya rumah, tanah, gudang penyimpanan hasil produksi dan lain sebagainya yang biasanya bersifat tidak bergerak.

1.5.2.2.3..... T

tingkat Pengeluaran Konsumsi Masyarakat**Berbasis Sumberdaya Lokal**

⁴⁴ Annisa Ganis Damarjati, *op. cit.*, hlm. I-62 – I-63.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. I-63.

Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membiayai jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Berikut pemaparan konsumsi menurut Sadono Sukirno:

“Barang-barang tersebut yang dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dan perbelanjaan tersebut dinamakan konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut.”⁴⁶

Jadi, dalam penelitian ini, tingkat pengeluaran konsumsi dapat diartikan sebagai sejumlah nominal yang dikeluarkan oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya.

Biro Pusat Statistik (dalam Nurul Hidayah), mengklasifikasikan barang konsumsi menjadi 7 kelompok, yaitu:

“Bahan makanan, makanan jadi, minuman, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi dan komunikasi serta menambahkan barang kebutuhan sosial keagamaan. Tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli sesuatu atau beberapa barang/ jasa dan terwujud dalam bentuk berbagai pilihan.”⁴⁷

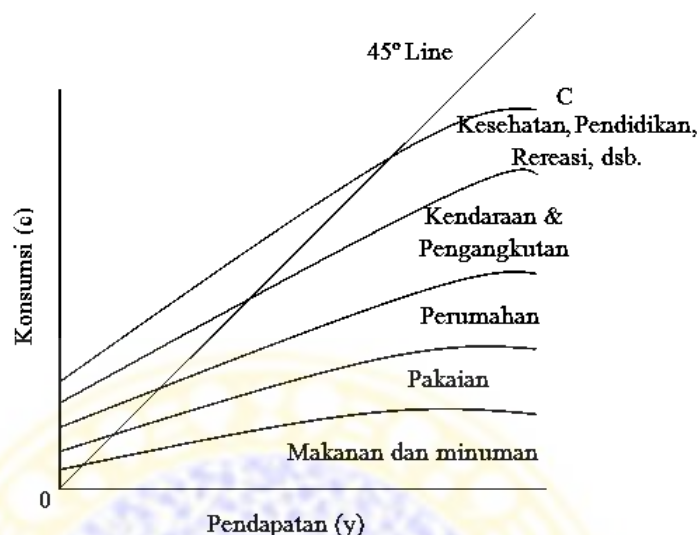
Rosyidi memaparkan ukuran kesejahteraan dilihat dari konsumsi suatu masyarakat, prioritas konsumsi dalam fungsi konsumsi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1

⁴⁶Sadono Sukirno, 2006, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 38.

⁴⁷Nurul Hidayah, *op. Cit.*, hlm. I-63 – I-64.

Prioritas Konsumsi di dalam Fungsi Konsumsi⁴⁸



Gambar di atas dengan tegas sekali menunjukkan urutan kebutuhan manusia serta prioritas untuk memperolehnya. Kebutuhan-kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) terletak pada urutan pertama, dan di dalam fungsi konsumsi terletak di urutan paling bawah. Di atasnya barulah kemudian menyusul kebutuhan-kebutuhan dari tingkat-tingkat selanjutnya, seperti kebutuhan akan kendaraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lima Kebutuhan dasar tersebut dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mengidentifikasikannya adalah dengan melihat peningkatan jumlah nominal yang dikeluarkan dalam mengkonsumsi kebutuhan yang dijadikan indikator di atas. Kemudian peneliti mengelompokkan konsumsi kebutuhan menjadi tiga, yaitu konsumsi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

⁴⁸ Suherma Rosyidi, 1996, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 151.

I.5.2.3.1..... T

Tingkat Konsumsi Kebutuhan Primer

Menurut Maslow dalam Nurul Hidayah, teori kebutuhan manusia, mengenai kebutuhan dasar yaitu:

“Kebutuhan dasar disebut juga dengan kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*.) Kebutuhan fisiologis berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti makan, sandang, papan, menghirup udara, dll. Pemenuhan konsumsi akan kebutuhan dasar akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada level berikutnya yang lebih tinggi.”⁴⁹

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama manusia yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, karena apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia tersebut akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan pemaparan teori di atas, maka peneliti mengelompokkan kebutuhan primer/dasar menjadi lima yaitu, kebutuhan sandang, pangan dan papan.

I.5.2.3.1.1. Tingkat Konsumsi Kebutuhan Sandang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandang diartikan sebagai bahan pakaian.⁵⁰ Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan pakaian yang diperlukan oleh manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi, tingkat konsumsi kebutuhan sandang adalah besaran jumlah nominal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian dan sebagainya.

I.5.2.3.1.2. Tingkat Konsumsi Kebutuhan Pangan

⁴⁹ Nurul Hidayah, *op. cit.*, hlm. I-66.

⁵⁰ Buku BBI, hlm 874.

Kebutuhan pangan atau dapat diartikan dengan kebutuhan makanan, merupakan kebutuhan utama yang diperlukan manusia untuk dapat bertahan hidup. Jadi, tingkat konsumsi kebutuhan pangan adalah besaran jumlah nominal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan seperti misalnya nasi, lauk-pauk dan lain-lain.

I.5.2.3.1.3. Tingkat Konsumsi Kebutuhan Papan

Kebutuhan papan yaitu kebutuhan akan tempat tinggal, seperti rumah, apartemen dan lainnya. Jadi, tingkat konsumsi kebutuhan papan adalah besaran jumlah nominal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal seperti rumah, kontrakan, apartemen dan lain-lain.

I.5.2.3.2. T

tingkat Konsumsi Kebutuhan Sekunder

Disamping kebutuhan primer/dasar, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah seluruh kebutuhan primer terpenuhi, seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

I.5.2.3.2.1. Tingkat Konsumsi Kebutuhan Pendidikan

Kebutuhan akan pendidikan kini telah menjadi salah satu kebutuhan utama yang diperlukan manusia untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menunjang IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Jadi, tingkat konsumsi kebutuhan pendidikan adalah besaran

jumlah nominal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan seperti kebutuhan sekolah dan lain-lainnya.

I.5.2.3.2.2. Tingkat Konsumsi Kebutuhan Kesehatan

Kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak kalah penting. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan kesehatan yang optimal demi memenuhi semua kebutuhannya. Tingkat konsumsi akan kesehatan juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi pendapatan maka tingkat konsumsi kesehatan yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Jadi, tingkat konsumsi kebutuhan kesehatan adalah besaran jumlah nominal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan seperti cek kesehatan, konsultasi dokter dan lain-lainnya.

I.5.2.3.3..... T**tingkat Konsumsi Kebutuhan Tersier**

Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan akan kendaraan dan hiburan.

I.5.2.3.3.1. Tingkat Konsumsi Kebutuhan Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mempermudah segala aktivitas manusia. Di kota besar seperti Surabaya saat ini, kendaraan menjadi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Oleh karena itu, konsumsi kebutuhan akan kendaraan juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Jadi yang dimaksud tingkat konsumsi kebutuhan kendaraan dalam penelitian ini adalah besaran jumlah nominal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan, seperti sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

I.5.2.3.3.2. Tingkat Konsumsi Kebutuhan Hiburan

Hiburan merupakan kebutuhan pendamping yang diperlukan manusia sebagai kebutuhan tambahan agar kehidupannya berjalan dengan baik dan seimbang. Kebutuhan akan hiburan seperti menonton bioskop, menonton sirkus, piknik, dan sebagainya. Jadi, tingkat konsumsi kebutuhan hiburan adalah besaran jumlah nominal yang

dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan seperti menonton bioskop, jalan-jalan, piknik, dan sebagainya.

I.5.3. Pertumbuhan Sistem *Revolving Fund* dalam Kelembagaan Usaha

Berputar/*revolve* menurut Suprpto dalam Alhadi, mengandung dua makna yaitu:

“a. Dana tersebut harus selalu berputar (tidak berhenti) dalam aktivitas individu atau kelompok yang dapat memanfaatkan melalui kegiatan yang bersifat produktif; b. Pengertian yang lebih luas dana tersebut harus selalu berputar untuk dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu atau kelompok yang lain.”⁵¹

Jadi yang dimaksud dengan *revolving fund* dalam penelitian ini adalah suatu perputaran dana dalam aktivitas sebuah kelompok agar dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Mubyarto, yang dimaksud lembaga (*institution*) adalah:

“Organisasi atau kaidah-kaidah, baik formil maupun informil, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat ada yang berasal dari adat kebiasaan mereka turun-temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat.”⁵²

Kelembagaan ditinjau dari sudut organisasi, menurut Amir Mutaqin adalah:

“Sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Dipandang dari sudut individu, kelembagaan merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya.”⁵³

⁵¹ Alhadi, 2010, *Dana Bergulir Pembangunan Rumah Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*, Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro, hlm. 15.

⁵² Mubyarto, 1977, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: PT Intermedia hlm. 44.

⁵³ Amir Mutaqin, 2008, *Analisis Kinerja Kelembagaan Agribisnis dan Efisiensi Teknik Usahatani Padi (Kasus Petani Binaan Lembaga Pertanian Sehat, Kab. Bogor, Jawa Barat)*, Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, hlm. 24.

Kelembagaan usaha dapat diartikan sebagai suatu sistem organisasi yang memiliki kontrol terhadap sumberdayanya dalam menjalankan sebuah usaha yang dijalankan bersama dan memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai. Dari pemaparan di atas, maka sistem perputaran dana (*revolving fund*) merupakan suatu sistem yang mengatur berputarnya dana yang diperoleh dalam suatu organisasi agar tetap stabil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dapat dimanfaatkan secara bergulir oleh sumberdayanya secara lebih produktif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan sistem *revolving fund* dalam kelembagaan usaha merupakan suatu proses tumbuh kembang atau kemajuan dari sistem perputaran dana yang telah dibuat dalam suatu organisasi. Pertumbuhan sistem ini sangat ditentukan dari berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, seperti halnya potensi dari anggota organisasi yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, dan lain sebagainya.

I.5.3.2. Sistem *Revolving Fund*

Merupakan suatu sistem yang mengatur berputarnya dana yang diperoleh dalam suatu organisasi agar tetap stabil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dapat dimanfaatkan secara bergulir oleh sumberdayanya secara lebih produktif.

I.5.3.1.1..... Konsep

Dana Berputar (*Concept of Revolving Fund*)

Revolving fund berasal dari 2 (dua) suku kata *revolve* dan *fund*. *Revolve* dalam kamus bahasa Inggris artinya memutar, sedang *fund* artinya

dana. Jadi secara akar kata, *revolving fund* dapat diartikan sebagai proses perputaran dana (modal) atau dana (modal) yang berputar.

Menurut UN-HABITAT , *Revolving Fund*/dana berputar adalah

“Pendanaan yang didirikan dengan tujuan untuk digulirkan/dipinjamkan kepada peminjam yang sama lebih dari satu kali. *Revolve*/berputar, berarti bahwa dana tersebut beredar diantara pengguna dan pengelola. Dana berputar didirikan untuk tujuan bahwa dana tersebut sebisa mungkin dapat beroperasi secara mandiri, artinya bahwa dalam operasinya didapatkan biaya/nilai tambah melalui pemberlakuan bunga, jasa, fee, dan lain sebagainya.”⁵⁴

Stein & Castillo dalam Alhadi mengatakan bahwa:

“Prinsip utama dalam keberlangsungan dana bergulir adalah disamping dana yang dikembalikan pasca pengguliran harus terjaga nilai riilnya, dana yang digulirkan itu pun harus menghasilkan dana tambahan sekalipun dalam nominal kecil dalam jangka menengah ataupun panjang.”⁵⁵

Jadi, konsep dana berputar adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara terus menerus memutar dana yang dimiliki oleh sebuah kelompok/organisasi dengan tujuan untuk menstabilkan dana dan juga meningkatkan dana yang dimiliki tersebut dengan berbagai cara yang disepakati, seperti mengolah dana dengan sistem simpan pinjam dan sebagainya.

I.5.3.1.2. Pembiayaan Dana Beputar (*Financing of Revolving Fund*)

Menurut UN-HABITAT , pembiayaan dana berputar adalah:

“Dana berputar dapat dibiayai oleh para pengguna itu sendiri atau oleh pengguna dari proyek-proyek atau mungkin dibiayai oleh pihak ketiga atau dibiayai dengan dana gabungan. Dalam

⁵⁴ UN-HABITAT , *loc. cit.*

⁵⁵ Alhadi, *loc. cit.*

beberapa kasus, dana tersebut akan tergantung dari suntikan-suntikan, kontribusi pihak lain dalam tabungan deposito, atau pembiayaan donor bertahap. Sumber dana bergulir dapat berasal dari pinjaman pihak lain dalam bentuk sumbangan, tabungan deposito atau pembiayaan donor bertahap atau mungkin kontribusi sukarela atau wajib. Dalam operasionalnya, dana tersebut akan terus berkembang seiring waktu sehingga akan mampu berdiri sendiri sepenuhnya melalui perkembangan dana itu. Kontribusi dari pihak lain (dari luar *target group*) atau dikenal dengan pembiayaan donor atau pembiayaan eksternal (*External financing*).⁵⁶

Kemudian UN-HABITAT lebih lanjut memaparkan mengenai peran serta lembaga donor dalam dana berputar sebagai berikut:

“Peran serta lembaga donor dalam dana berputar mungkin dalam bentuk hibah, bebas bunga didepan, atau bersifat bantuan, atau kombinasi dari keduanya serta jaminan. Namun, ketergantungan pada pendanaan donor harus bersifat sementara dan secara bertahap bisa bebas dari ketergantungan terhadap lembaga donor tersebut. Walaupun tidak ada hambatan teknis yang seratus persen berasal dari sumber pembiayaan, pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan keuangan dari kelompok sasaran merupakan prasyarat keberhasilan utama dalam mencapai tujuan dana bergulir. Keterlibatan dari kelompok sasaran dapat berbentuk kontribusi wajib atau sukarela.”⁵⁷

Jadi, pembiayaan dana berputar dapat diartikan sebagai suatu sumber dana yang mempercayakan sejumlah dana untuk kemudian dikelola oleh sebuah kelompok/organisasi dengan tujuan tertentu yang telah disepakati bersama, biasanya dapat berasal dari pengelola organisasi itu sendiri, pihak luar seperti perusahaan atau lembaga donor dana hibah atau dana gabungan dari keduanya.

⁵⁶ UN-HABITAT, *op. cit.*, hlm. 8.

⁵⁷ *Ibid.*

I.5.3.1.3. Manajemen dan Administrasi Dana Berputar (*Management and Administration of Revolving Fund*)

Masih menurut UN-HABITAT , yang dimaksud manajemen dan administrasi dalam dana berputar adalah:

“Dana berputar memiliki berbagai hubungan finansial dengan para pemodal dan para pengguna dana yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau cicilan dan menyampaikan laporan. Jika dana memiliki status hukum yang independen atau bebas, akan ada kewajiban hukum untuk menyerahkan laporan keuangan secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memisahkan catatan-catatan keuangan pada seluruh dana yang beredar setiap saat. Di banyak Negara, kewajiban pelaporan keuangan dan bentuk laporan yang harus disampaikan ditetapkan dengan Undang-undang. Laporan keuangan harus mencakup catatan laba dan rugi, laporan arus kas mengindikasikan gambaran dari berbagai sumber dan aplikasi dana serta neraca keuangan yang telah disetujui oleh pengawas dana dan oleh auditor eksternal dan harus diselesaikan setiap tahun dalam waktu tiga bulan dari akhir tahun keuangan.”⁵⁸

Jadi, manajemen dan administrasi dalam dana berputar dapat diartikan sebagai sebuah proses tata kelola yang tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, komunikasi, pengendalian serta pengawasan dalam proses perputaran dana.

1.5.3.1.3.1. Perencanaan Perputaran Dana

Menurut Handoko, definisi perencanaan adalah:

“Proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan

⁵⁸ *Ibid.*

melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya”. Jadi perencanaan adalah pilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.⁵⁹

Masih menurut Handoko, terdapat empat tahap dasar perencanaan yaitu, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.⁶⁰

I.5.3.1.3.1.1. Menetapkan Tujuan atau Serangkaian Tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdaya-sumberdayanya secara tidak efektif.

Begitu juga dalam proses perputaran dana memerlukan suatu perencanaan yang matang agar dana yang dimanfaatkan dapat digunakan secara efektif.

I.5.3.1.3.1.2. Merumuskan Keadaan Saat Ini

Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumberdaya-sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Pada tahap kedua ini, memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik – yang didapatkan melalui komunikasi dalam perusahaan.

⁵⁹T. Hani Handoko, 2003, Manajemen, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hlm. 77-78.

⁶⁰*Ibid*, hlm 79.

Dalam proses perputaran dana, sangat penting sekali mengetahui keadaan di lingkungan sekitar agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan sesuai.



I.5.3.1.3.1.3. Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah.

Hal ini sangat diperlukan bagi organisasi untuk mengantisipasi keadaan, masalah, keadaan serta ancaman yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

I.5.3.1.3.1.4. Mengembangkan Rencana atau Serangkaian Kegiatan Untuk Pencapaian Tujuan

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

1.5.3.1.3.2. Pengorganisasian Perputaran Dana

Menurut Handoko, definisi pengorganisasian adalah:

“Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.”⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm 167.

Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses, akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses ini akan tercermin pada struktur organisasi, yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, diantaranya: pembagian kerja, rantai perintah dan kesatuan perintah, serta saluran komunikasi.⁶²

1.5.3.1.3.2.1. Pembagian Kerja

Tujuan utama dari sebuah organisasi adalah untuk menjapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai dengan cara individu. Sejumlah orang yang terdiri dari dua orang atau lebih bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan akan dapat mencapai hasil yang lebih bila dibandingkan dengan perseorangan. Konsep ini disebut *synergy*. Dan tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja yang memungkinkan *synergy* terjadi.⁶³

1.5.3.1.3.2.2. Rantai Perintah dan Kesatuan Perintah

Rantai perintah menunjukkan hubungan wewenang tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi.⁶⁴

1.5.3.1.3.2.3. Saluran Komunikasi

Merupakan tempat dimana informasi dipertukarkan agar dapat dimengerti dan dipahami oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan melalui saluran komunikasi formal dan informal.

⁶² *Ibid*, hlm 169.

⁶³ *Ibid*, hlm. 171-172.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 172.

1.5.3.1.3.3. Koordi nasi dalam Perputaran Dana

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko, mekanisme-mekanisme pengkoordinasian mencakup aturan dan prosedur, hirarki manajemen, serta rencana dan penetapan tujuan.

I.5.3.1.3.3.1. Aturan dan Prosedur

Adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.

I.5.3.1.3.3.2. Hirarki Manajemen

Rantai perintah, aliran informasi, dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.

I.5.3.1.3.3.3. Rencana dan Penetapan Tujuan

Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memroses seluruh informasi yang

diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan organisasi.

1.5.3.1.3.4. Komun

ikasi dalam Perputaran Dana

Menurut Richard L. Daft, komunikasi dapat didefinisikan sebagai:

“Proses dimana informasi dipertukarkan dan dimengerti oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku.”⁶⁵

Saluran komunikasi dalam organisasi biasanya mencakup saluran komunikasi formal dan informal.⁶⁶

I.5.3.1.3.4.1. Saluran Komunikasi Formal

Saluran komunikasi formal mengalir dalam tiga arah—ke bawah, ke atas dan horizontal.

I.5.3.1.3.4.1.1. Komunikasi ke Bawah

Mengacu pada pesan dan informasi yang dikirim dari manajemen puncak kepada bawahan dengan arah ke bawah.

I.5.3.1.3.4.1.2. Komunikasi ke Atas

Merupakan saluran komunikasi yang formal termasuk pesan yang mengalir dari tingkat bawah ke atas dalam hirarki organisasi.

I.5.3.1.3.4.1.3. Komunikasi Horisontal

Merupakan pertukaran pesan secara menyamping atau diagonal diantara sesama atau rekan sekerja.

⁶⁵ Richard L. Daft, 2003, *Manajemen Edidi ke Lima*, Jakarta: Erlangga, hlm. 132.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 142.

I.5.3.1.3.4.2. Saluran Komunikasi Informal

Merupakan sebuah saluran komunikasi yang hadir di luar saluran otorisasi formal tanpa memperhatikan hirarki otorisasi organisasi.

1.5.3.1.3.5. Pengan- dalian dalam Perputaran Dana

Masih menurut Richard L. Daft, pengendalian organisasi adalah:

“Suatu proses pengaturan aktivitas-aktivitas organisasi secara sistematis, agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target dan standar kinerja.”⁶⁷

Kemudian Richard L. Daft, mengelompokkan pengendalian dalam tiga tipe yaitu, pengendalian antisipatif, pengendalian bersama dan pengendalian umpan balik.⁶⁸

I.5.3.1.3.5.1. Pengendalian Antisipatif

Merupakan pengendalian yang berupaya mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan sebelum penyimpangan terjadi. Pengendalian ini berfokus pada manusia, bahan baku, dan sumberdaya keuangan yang mengalir ke dalam organisasi.

Pengendalian antisipatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya mengidentifikasi dan mencegah hal-hal yang diperkirakan menyimpang dalam proses perputaran dana guna mencegah timbulnya masalah di masa depan, seperti melakukan pengecekan/penyortiran terhadap bahan baku/sampah-sampah yang hendak diterima dan lainnya.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 226

⁶⁸ *Ibid*.

I.5.3.1.3.5.2. Pengendalian Bersama

Merupakan pengendalian yang memantau aktivitas berjalan karyawan untuk memastikan aktivitas tersebut konsisten dengan standar kualitas.

Pengendalian bersama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pengendalian yang dilakukan secara bersama dengan seluruh anggota organisasi, misalnya seperti tindakan pemantauan terhadap proses simpan pinjam di bank sampah tersebut apakah sudah sesuai standar atau belum, dan jika belum maka mereka akan melakukan koreksi atau memberi tahu orang yang tepat bahwa ada masalah yang harus harus ditangani.

I.5.3.1.3.5.3. Pengendalian Umpan Balik

Dapat juga diartikan dengan pengendalian setelah kejadian atau pengendalian output, pengendalian umpan balik berfokus pada pada output organisasi—khususnya, kualitas dari produk atau jasa akhir.

Pengendalian umpan balik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pengendalian yang dilakukan setelah mengalami suatu kejadian, seperti penerimaan bahan baku yang kurang memenuhi standar, jumlah kredit yang diberikan terlalu banyak sehingga menyebabkan defisit dan lain sebagainya.

1.5.3.1.3.6. Pengawasan dalam Perputaran Dana

Menurut T. Hani Handoko, pengawasan dapat didefinisikan sebagai:

“Proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.⁶⁹

Menurut Baswir dalam Ira Halidayati, pengklasifikasian 1) penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), 2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan 5) pengambilan tindakan koreksi bila perlu pengawasan menurut lingkungannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengawasan internal dan eksternal.⁷⁰

I.5.3.1.3.6.1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal departemen atau lembaga Negara yang diawasi.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang masih berasal dari lingkungan internal organisasi.

I.5.3.1.3.6.2. Pengawasan Eksternal

⁶⁹ T. Hani Handoko, hlm. 359.

⁷⁰ Ira Halidayati, 2014, *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*, Artikel Ilmiah, Padang: Universitas Negeri Padang.

Merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif.

Pengawasan eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang berasal dari luar organisasi.



I.5.3.3. Keberlanjutan Dana Berputar (*Sustainability of Revolving Fund*)

UN-HABITAT memaparkan mengenai konsep keberlanjutan dana berputar sebagai berikut:

“Dana berputar diharapkan bisa menjadi swadaya setelah periode awal. Modalnya diperkirakan akan tetap konstan pada tingkat yang lebih atau kurang tanpa pembiayaan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi operasi dari dana berputar adalah suku bunga (untuk pinjaman dan/atau pengembalian), tingkat premi; biaya administrasi; pembayaran atau pengembalian dan kegagalan dalam membentuk hal-hal tersebut; juga oleh inflasi dan hutang. Dalam rangka untuk menjaga dana berputar mandiri tetap mencukupi, langkah-langkah yang tepat dapat diadopsi untuk meningkatkan dan memantau faktor-faktor tersebut untuk operasi perbaikan yang efektif.”⁷¹

Jadi, keberlanjutan dana berputar disini berfungsi sebagai suatu pencapaian atau tindak lanjut dari proses perputaran dana yang telah berlangsung dan dianggap berhasil untuk kemudian dikembangkan lagi demi meningkatkan jumlah dana yang dikelola oleh organisasi tersebut.

I.5.4. Dampak Pertumbuhan Sistem Revolving Fund pada Tingkat Kesejahteraan ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal

Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu (baik positif maupun negatif). Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘sesuatu’.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Sarif Hidayat, 2013, *Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Slingo, Kecamatan dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 1.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

“(a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”⁷³

Jadi, secara umum suatu pemberdayaan memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan sistem *revolving fund* merupakan suatu proses tumbuh kembang atau kemajuan dari sistem perputaran dana yang telah dibuat. Pertumbuhan sistem ini sangat ditentukan dari berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, seperti halnya potensi dari anggota organisasi yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, dan lain sebagainya.

Menurut hasil penelitiannya, Yohana Andreas Krisnawati mengungkapkan dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Dlingo, Yogyakarta, menyebutkan bahwa terdapat peningkatan perekonomian, terdapat adanya pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakatnya, dan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷⁴

⁷³Edi Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 58.

⁷⁴ Yohana Andreas Krisnawati. 2013. *Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan*. Jurnal online. Malang: Universitas Negeri Malang. (diakses di <http://jurnal->

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, sesuai dengan kebutuhan penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa dampak pertumbuhan sistem *revolving fund* pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal berpengaruh terhadap 3 hal, diantaranya adalah peningkatan pemupukan modal, pengembangan kapasitas organisasi serta peningkatan diversifikasi produk.

I.5.4.1. Peningkatan Pemupukan Modal

Adam Smith dalam M. L. Jhingan menganggap pemupukan modal sebagai:

“Salah satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata.”⁷⁵

Dari pemaparan teori Adam Smith di atas, maka peneliti membagi beberapa indikator yang dianggap berpengaruh dalam peningkatan pemupukan modal yaitu modal investasi, modal operasional, dan laba/keuntungan, karena ketiga indikator ini dirasa sesuai dengan kebutuhan peneliti di lapangan.

I.5.4.1.1. Modal Investasi

Menurut Henry Faizal Noor, secara konsep, investasi adalah:

“Kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya (*resources*) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan, maka sumberdaya (*resources*) ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) kedalam satuan moneter

online.um.ac.id/data/artikel/artikelC9CDD3A470BFB5675F342F1C59BEBA28.pdf pada tanggal 26 Maret 2015).

⁷⁵ M. L. Jhingan, 2008, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 82.

atau uang. Dengan demikian secara konsep, investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari.”⁷⁶

Berdasarkan pemaparan mengenai investasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modal investasi adalah modal yang berupa moneter atau uang yang dialokasikan saat ini untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan.

I.5.4.1.2. Modal Operasional

Secara operasional, pengertian uang atau dana lebih mendekati pengertian luas, yaitu:

“Semua sumberdaya yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi faktor produksi, tanpa atau dengan meninggalkan kewajiban atau *liabilities*. Oleh karena itu, dalam pengertian luas ini, lebih banyak diartikan dengan aneka sumberdaya, baik berupa uang tunai (*cash*) maupun bukan (*non cash*).”⁷⁷

Jadi, modal operasional dapat diartikan dengan modal yang digunakan atau dipakai untuk menunjang kegiatan produksi. Dalam penelitian ini, kegiatan produksi tersebut dapat berupa misalnya alat pengambil sampah, perahu, gudang penyimpanan sampah dan lain sebagainya yang dapat berupa uang maupun barang.

I.5.4.1.3. Laba/Keuntungan

Soemarso mendefinisikan laba (*income*) sebagai berikut:

⁷⁶Henry Faizal Noor, 2009, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: PT Indeks, hlm. 4.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 28.

“Selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.”⁷⁸

Sedangkan menurut Horngren dkk, laba bersih adalah:

“Kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Disebut juga pendapatan bersih atau net earnings.”⁷⁹

Jadi, laba atau keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah selisih positif biaya antara pendapatan dengan pengeluaran.

I.5.4.2. Pengembangan Kapasitas Organisasi

Pengembangan berasal dari kata kembang, dengan penambahan awalan pe- dan akhiran an. Kembang adalah kata sifat (*adjective*) yang bermakna tidak tidur, tidak diam, bergerak, bertambah, maju, berubah dan seterusnya. Kata pengembangan mempunyai arti yang mirip dengan pembangunan.⁸⁰ Jadi dapat diartikan bahwa pengembangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan ke arah yang lebih baik.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. *Capacity building* dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak. Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan

⁷⁸ Soemarso S. R., 2005, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Salemba Emban Patria, hlm. 245.

⁷⁹ Charles T. Horngren, Walter T. Harisson, Jr., Michael T. Robinson, 1997, *Akuntansi di Indonesia*, Jakarta: PT Salemba Emban Patria, hlm. 30.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 29.

kapasitas menurut Milen dalam Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto bahwa:

“Pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator).”⁸¹

Dari pemaparan di atas, maka pengertian dari pengembangan kapasitas organisasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkuat organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. Dalam pengembangan kapasitas organisasi, peneliti berfokus pada peningkatan kemampuan manajerial dan peningkatan sistem manajemen.

I.5.4.2.1. Peningkatan Kemampuan Manajerial

Kemampuan manajerial dapat diartikan kecakapan atau kesanggupan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut tercermin pada perannya sebagai pemimpin yaitu membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran. Akdon dalam Denny Ferry Darmawan, Djumadi, Enos Paselle, mendefinisikan kemampuan manajerial sebagai:

⁸¹ Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto, *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*, Malang: Universitas Brawijaya, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, hlm. 103-110.

“Seperangkat ketrampilan teknis dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan lembaga dapat mendayagunakan segala sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien”.⁸²

Jadi peningkatan kemampuan manajerial yang dimaksud adalah suatu proses atau usaha untuk meningkatkan kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

I.5.4.2.2. Peningkatan Sistem Manajemen

Menurut Stoner dan Freeman dalam Wibowo, manajemen merupakan:

“Suatu proses menggunakan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi *planning* dan *decision making*, *organizing*, *leading* dan *controlling*. Manajemen juga dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.”⁸³

Jadi peningkatan sistem manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses atau usaha untuk meningkatkan sistem (cara) untuk menggunakan semua sumberdaya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.

I.5.4.3. Peningkatan Diversifikasi Produk

⁸² Denny Ferry Darmawan, Djumadi, Enos Paselle, 2013, *Peningkatan Kemampuan Manajerial Dalam Memacu Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*, ejournal Administrative Reform, Vol. 1, No. 3, hlm. 694-707.

⁸³ Wibowo, 2008, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1-2.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diversifikasi berarti penganekaragaman⁸⁴. Diversifikasi produk dapat diartikan sebagai penganekaragaman produk. Produk yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sampah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan diversifikasi produk yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah meningkatnya keberagaman jenis produk yang diproduksi masyarakat sasaran, yang dalam hal ini adalah sampah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti menggunakan 3 indikator yang dianggap berpengaruh terhadap peningkatan diversifikasi produk, diantaranya adalah variasi jenis produk, volume produk dan jangkauan distribusi/pemasaran produk.

I.5.4.3.1. Variasi Jenis Produk

Variasi jenis produk dalam penelitian ini dapat diartikan dengan berbagai bentuk (rupa, jenis, dsb) dari suatu produk tersebut. Peneliti ingin mengetahui seberapa banyak variasi jenis produk yang telah diproduksi oleh masyarakat sasaran.

I.5.4.3.2. Volume Produk

Volume produk merupakan ukuran besarnya, banyaknya maupun bobot dari suatu produk. Jadi yang dimaksud dengan volume produk dalam penelitian ini adalah ukuran besarnya, banyaknya maupun bobotnya suatu produk yang telah dihasilkan.

I.5.4.3.3. Jangkauan Distribusi/Pemasaran Produk

⁸⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hlm. 239.

Jangkauan distribusi/pemasaran produk adalah besarnya kemampuan yang dimiliki oleh produsen ataupun distributor untuk meraih berbagai konsumen di berbagai wilayah. Jangkauan distribusi/pemasaran produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa besar kemampuan produsen dalam memasarkan produk yang telah dihasilkan.



I.6. Definisi Konsep

1.6.1. *Revolving Fund*

Merupakan suatu perputaran dana dalam aktivitas sebuah kelompok agar dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu yang satu dengan yang lainnya.

1.6.2. *Sistem Revolving Fund*

Merupakan suatu sistem yang mengatur berputarnya dana yang diperoleh dalam suatu organisasi agar tetap stabil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dapat dimanfaatkan secara bergulir oleh sumberdayanya secara lebih produktif.

1.6.3. *Pertumbuhan Sistem Revolving Fund*

Merupakan suatu proses tumbuh kembang atau kemajuan dari sistem perputaran dana yang telah dibuat. Pertumbuhan sistem ini sangat ditentukan dari berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, seperti halnya potensi dari anggota organisasi yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan pertumbuhan sistem *revolving fund*, peneliti menggunakan perspektif konsep, pembiayaan, manajemen dan adminitrasi, serta keberlanjutan dari perputaran dana tersebut.

1.6.4. *Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal*

Merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal agar dapat hidup layak dan berkecukupan.

Untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal, peneliti menggunakan perspektif dari tingkat pendapatan masyarakat berbasis sumberdaya lokal, tingkat pemilikan dan penguasaan aset berbasis sumberdaya lokal, dan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

1.6.5. Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal

Merupakan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar mangrove, yang menggantungkan pendapatannya dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh mangrove tersebut.

1.6.6. Dampak Pertumbuhan Sistem *Revolving Fund* Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal

Merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan sistem *revolving fund* di Bank Sampah Bintang Mangrove pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya local mangrove. Untuk menggambarkan dampak tersebut, peneliti menggunakan perspektif peningkatan pemupukan modal, pengembangan kapasitas organisasi, dan peningkatan diversifikasi produk.

I.7. Metodologi Penelitian

I.7.1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan:

“Metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan

prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.”⁸⁵

Peneliti memilih metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan pendekatan ini dianggap lebih cocok dan sesuai dengan hasil (data) yang nantinya diinginkan oleh peneliti. Dari beberapa strategi kualitatif yang diungkapkan oleh John W. Creswell, diantaranya adalah penelitian naratif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, dan studi kasus, peneliti memutuskan untuk menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus.

Studi kasus merupakan:

“Strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.”⁸⁶

Peneliti menggunakan strategi penelitian studi kasus karena dengan strategi penelitian tersebut memang ditujukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian mendalam secara cermat mengenai suatu program atau kebijakan, yang dalam hal ini peneliti berfokus pada dampak pertumbuhan sistem *revolving fund* program bank sampah bintang mangrove pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal mangrove.

1.7.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih peneliti adalah Bank Sampah Bintang

⁸⁵ John W. Creswell, 2013, *RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 20.

Mangrove, Jalan Gununganyar Tambak III, Kelurahan Gununganyar Tambak, Kota Surabaya, dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Yang pertama, bank sampah bintang mangrove tersebut telah mendapatkan predikat sebagai bank sampah terbaik dari seluruh bank sampah binaan PLN. Yang kedua, bank sampah di daerah tersebut mampu memutar dana yang telah diberikan oleh PLN yakni mampu meningkat sebesar 61,29% hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga, dampak yang signifikan dapat dirasakan langsung dari bank sampah tersebut, yakni dalam hal kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar mangrove.

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan februari 2015, dengan melakukan observasi, pada saat itu pihak Bank Sampah Bintang Mangrove hanya meminta surat pengantar dari Universitas saja sebagai bukti/izin penelitian, namun ketika peneliti kemudian akan melakukan wawancara baru pihak Bank Sampah Bintang Mangrove meminta surat izin penelitian dari Bakesbang, Kecamatan hingga Kelurahan, sehingga surat izin yang tertera pada lampiran adalah bulan mei 2015. Atas terjadinya sedikit kendala tersebut kemudian peneliti dapat melakukan wawancara pada akhir bulan mei 2015.

I.7.3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah:

“Kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis

datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.”⁸⁷

Jadi dapat dikatakan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan mewawancarai informan kunci dan masyarakat tertentu sesuai dengan daftar sampel yang telah diambil dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disediakan. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai sumber data, diantaranya adalah dokumen pribadi milik Bank Sampah Bintang Mangrove dan sumber terkait lainnya.

I.7.4. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Dengan mengambil teknik *non random sampling* yaitu *Purposive Sampling*. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik penarikan sampel *purposive* ini disebut juga *judgemental sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai

⁸⁷ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 157.

petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel.⁸⁸

Peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik ini karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peneliti hanya akan mengambil informan berdasarkan kebutuhan penelitian saja, dan peneliti berhak menentukan siapa-siapa saja yang dianggap penting untuk mendukung penelitiannya.

Menurut Spradley sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses akulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber.⁸⁹

Setelah melalui pengamatan dan pendalaman data-data terkait, maka peneliti menetapkan 6 informan yang akan diwawancarai. Dari 6 informan tersebut, 3 informan adalah pengurus aktif Bank Sampah Bintang Mangrove

⁸⁸ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, hlm. 31.

⁸⁹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm 221.

(BSBM) yang 1 diantaranya adalah merupakan *key informan*, dan 3 informan lainnya adalah masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang merupakan nasabah bank sampah yang mengambil sampah dari mangrove. Berikut datanya:

Tabel I.2

Daftar Informan

No	Nama	Umur	Jabatan/Pekerjaan	Status Informan
1	Ibu Chusniyati	41 tahun	Sekretaris Bank Sampah Bintang Mangrove	<i>Key informan</i>
2	Bapak Sunaryo	38 tahun	Ketua Bank Sampah Bintang Mangrove	Informan
3	Ibu Rifa'ah	43 tahun	Seksi Pemasaran Bank Sampah Bintang Mangrove	Informan
4	Pak Samiran	50 tahun	Masyarakat	Informan
5	Pak Rozi	70 tahun	Masyarakat	Informan
6	Ibu Fifi	20 tahun	Masyarakat	Informan

I.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi secara terus menerus, kemudian dilakukan *indept interview* sebagai teknik utama pengumpulan data. *Indept interview* atau wawancara mendalam akan dilakukan dengan narasumber yang mengetahui secara mendetail tentang objek penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang juga merujuk dari John W. Creswell, sebagai berikut :

I.7.5.1. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas

individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti), aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Dalam tahap ini, yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengamati, bertanya dan kemudian mencatat apa saja yang dirasa dibutuhkan saat melakukan wawancara nanti, seperti siapa sajakah orang-orang yang dinilai tahu dan paham benar mengenai target persoalan dan sebagainya.

I.7.5.2. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif, peneliti melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan. Teknik yang dilakukan adalah dengan *indept interview* sebagai teknik utama pengumpulan data. *Indept interview* atau wawancara mendalam akan dilakukan dengan narasumber yang mengetahui secara mendetail tentang objek penelitian.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tanya jawab secara lisan dengan informan terkait di lingkungan Bank Sampah Bintang Mangrove dan masyarakat sekitar yang terkait secara langsung dengan obyek penelitian, dan kemudian mengadakan pencatatan terhadap hasil tanya jawab tersebut.

I.7.5.3. Dokumentasi

Selama proses-proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, surat

maupun e-mail). Teknik dokumenter ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh data-data tentang aspek-aspek yang diteliti. Peneliti juga memanfaatkan sumber data *online*, karena saat ini sudah sangat banyak *database* yang menyajikan berbagai informasi penting yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan data penelitian.

I.7.6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Disini, peneliti memiliki kedudukan yang cukup rumit dalam penelitian. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.⁹⁰ Selain itu, instrumen penelitian pendukung lainnya juga dibutuhkan, seperti pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera, buku catatan, dan instrumen terkait lainnya.

I.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut John W. Creswell, definisi validitas kualitatif adalah:

“Upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.”⁹¹

Data yang berhasil dikumpulkan dari wawancara mendalam, pengamatan insidental, dan dokumen-dokumen yang relevan diusahakan kemantapan dan keabsahannya. Untuk meningkatkan keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 168.

⁹¹ John W. Creswell, *op. cit.*, hlm. 285.

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moleong, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna *sumber*, *metode*, *penyidik* dan *teori*. Peneliti memutuskan menggunakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan pengguna sumber atau dengan kata lain triangulasi sumber. Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹²

I.7.8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

⁹² Lexy J. Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 330.

Pada tahap teknik pengolahan dan analisis data, John W. Creswell mendefinisikan analisis data sebagai berikut:

“Proses keberlanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.”⁹³

Sedangkan menurut Patton dalam Moleong analisis data, adalah:

“Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.”⁹⁴

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa:

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.”

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”⁹⁵

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai analisis data, kemudian Sugiyono menyimpulkan bahwa analisis data adalah:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

⁹³ John W. Creswell, *op.cit.*, hlm. 274.

⁹⁴ Lekxy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 103.

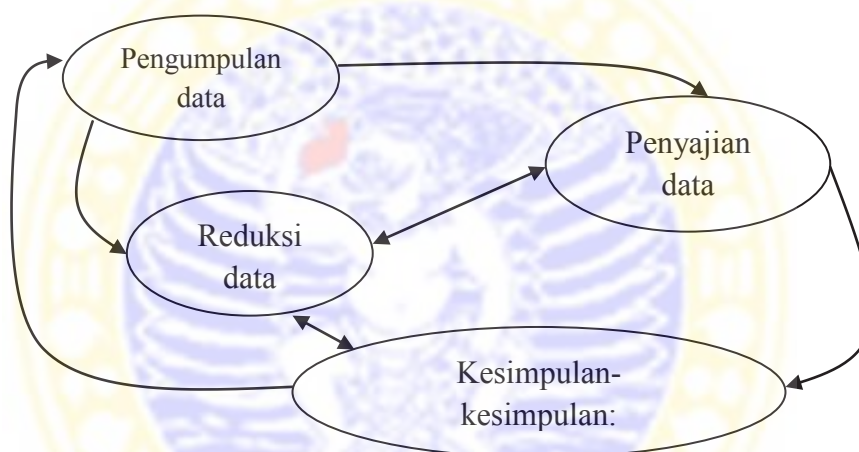
⁹⁵ Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 244.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”⁹⁶

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data penelitian untuk kemudian dipaparkan/diinterpretasikan sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan yang memadai. Menurut Miles & Huberman, teknik analisis data kualitatif meliputi:

Gambar I.1

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif⁹⁷



a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, keabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Mathew B. Miles, dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta: UI Press, hlm. 20.

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁹⁸ Dengan menyajikan data, akan dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah diperoleh tersebut. Dalam proses ini, peneliti dituntut untuk dapat mentransformasikan data kasar menjadi bentuk tulisan yang lebih mudah dipahami.

c. Menarik kesimpulan

Merupakan bagian dari keseluruhan proses atau kegiatan penelitian yang utuh dan dilakukan selama penelitian berlangsung. Dalam proses ini akan ditarik suatu kesimpulan awal yang sifatnya sementara, dan tidak akan

⁹⁸ Sugiyono, *op. cit*, hlm. 249.

berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan awal yang ditarik harus didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.⁹⁹

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.



⁹⁹ Mathew J. Miles, dan A. Michael Huberman, *op. cit.*, hlm. 16-20.